

# DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN)

Adit Abil Faturahman <sup>a,1</sup>, Ariel Muhammad Syahril Mubarak <sup>b,2,\*</sup>, Ilham Marta <sup>c,3</sup>, Roja Fauzi <sup>d,4</sup>, Muhammad Andi Septian <sup>e,5</sup>

<sup>a,b,c,d,e</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Bandung 40614, Indonesia

<sup>2</sup> [arielsyahrilmubarak@gmail.com](mailto:arielsyahrilmubarak@gmail.com)

\* corresponding author

---

## ARTICLE INFO

---

### Article history

Received December 2023

Revised May 2024

Accepted May 2024

## ABSTRACT

The relocation of the National Capital is an urgency and the government's efforts to increase the capacity of Jakarta, which is no longer ideal for becoming the capital city, then have a negative impact on the city of Jakarta itself, however moving the capital city is considered inappropriate because it seems to be too much of a budget which Indonesia considers currently not capable so that I am worried that this relocation will not be a solution but a new problem for Indonesia. The aim of this research is to find out what impacts it will have on Indonesia if the relocation of the country's capital is completed and not completed. This research uses a qualitative approach through data collection, literature, interviews and analysis. content. This research shows that moving the capital city has a negative impact on Indonesia with several things at stake for development such as natural wealth in Kalimantan and also Indonesia's increasing debt which is feared to be difficult to pay off, even though moving the country's capital has a positive impact on Indonesia's economic development and is one of the efforts to handle the city of Jakarta which exceeds its capacity. This research contributes to the government using the budget well so that IKN development runs smoothly.

### Keywords

Transfer, Funding, National capital

---

## 1. Pendahuluan

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan diupayakan pemerintah untuk segera mungkin selesai. Hal tersebut tidak terlepas dari Upaya pemerataan pembangunan nasional agar tidak terkesan Jawa Sentris serta dapat mengoptimalkan potensi alam di wilayah Indonesia timur sebagai sumber pendapatan negara. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi salah satu *major project* di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembangunan tersebut ternyata mendapat beberapa penolakan dari berbagai macam elemen masyarakat. Penolakan tersebut dikarenakan pemindahan Ibu kota negara (IKN) berdampak buruk terhadap kekayaan hutan di Kalimantan timur, hal tersebut dikarenakan wilayah pemindahan IKN dikelilingi beberapa area konsesi pertambangan yang bisa berdampak pada pencemaran air yang akan merusak sistem hidrologi lalu berdampak kepada biodiversitas di Kalimantan. Banyaknya konsesi pertambangan bukan hanya berdampak pada pencemaran air melainkan berpotensi menimbulkan kebakaran. Selanjutnya, rencana pemindahan ASN juga salah satu faktor dampak buruk pemindahan Ibu kota negara (IKN) yang akan menimbulkan masalah sosial yang akan berdampak pada kondisi ASN terutama ASN kementerian, lembaga non kementerian, dan lembaga independent yang mayoritas sudah lama tinggal di wilayah metropolitan Pulau Jawa. Hal tersebut dikarenakan perbedaan kepribadian antara ASN yang hidup di wilayah metropolitan dan warga sekitar yang mayoritas penduduk wilayah pedesaan atau (*rural area*) akan berdampak konflik horizontal dan konflik vertikal antara dua komunitas.

Warga sekitar yang mayoritas Suku Dayak yang masih berpegang teguh kepada adat istiadat suku Dayak beserta seluruh nilai tradisionalnya berpotensi menentang kedatangan masyarakat urban ASN Walhi (2022). Konflik vertikalpun berpotensi terjadi antara pemerintah dengan masyarakat tradisional yang disebabkan oleh pengalihfungsian lahan, eksploitasi hutan adat, dan menghasilkan Masyarakat heterogen yang tidak akurat. Faktor lainnya adalah penambahan utang negara dan defisit anggaran Pendanaan IKN yang menggunakan skema APBN perlu perencanaan anggaran yang matang Saraswati & Ad (2022). Skema pendanaan IKN yang terpusat pada pendanaan diluar APBN dimana anggaran APBN yang digunakan hanya sebesar 91,29 Triliun saja atau sebesar 19,54%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan APBN untuk mendanai secara langsung proyek hanya sebesar 19,54%. Sisa anggaran yang dianggarkan bersumber dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU dan modal badan usaha. Pembangunan IKN sendiri menjadi salah satu major project dengan anggaran yang tertinggi bernilai RP 466,98 Triliun (Hidayat, n.d.). Akibatnya, kemungkinan beberapa fasilitas seperti infrastruktur dasar, infrastruktur umum, dan beberapa fasilitas lainnya yang memiliki anggaran bersumber dari KPBU dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu ataupun memakan biaya yang lebih mahal dikarenakan selesai tidak tepat waktu. potensi kerugian yang akan dialami oleh negara apabila proyek IKN selesai. berdasarkan penjelasan sebelumnya terdiri dari anacam kerusakan alam, konflik antar komunitas, dan ketidak stabilan ekonomi.

Penulis akan menguraikan beberapa fakta yang penulis temukan berkaitan potensi kerugian tersebut. Pertama, potensi kerusakan alam. Dalam perencanaan pemerintah dalam *smart governance* pengelolaan kota yang pintar, dengan konsep *forest city* kota yang berkonsep hutan sebanyak 70% area hijau menjadikan IKN (Ibu kota Nusantara) menjadi kota Impian semua orang. Kawasan hutan yang akan dijadikan IKN sebesar 265 ribu hektar, berdasarkan fakta diatas bahwa Kawasan hijau IKN 70% maka ada 30% area hutan yang dideforestasi untuk pembangunan insfrastuktur, namun pada nyatanya Kawasan hutan 256 ribu hektar yang akan dibangun IKN hanya 43% yang layak disebut hutan maka 57% hutan sudah tidak sehat dan akan dideforestasi 30% untuk pembangunan insfrastuktur (Suchahyo, 2023).

Berdasarkan fakta diatas maka dapat kita lihat deforestasi hutan IKN 30% dan ditambah dengan area hutan yang sudah tidak sehat 57% maka setidaknya ada 73% hutan IKN akan rusak yang akan mempengaruhi rusaknya ekosistem pada hutan dan juga sistem hidrologi (Walhi, 2022). Kedua, potensi konflik antar komunitas, potensi konflik akan terjadi dalam pemindahan IKN selain kepribadian antara warga sekitar dan para pendatang yang berbeda. Potensi konflik melalui kekhawatiran warga sekitar seperti suku Balik yang mengkhawatirkan pembangunan IKN akan merusak ruang lingkup mereka seperti proyek normalisasi Sungai Sepaku, Penajam Pasir Utara yang mengancam peninggalan leluhur mereka (KBR, 2023). Kemudian penambahan utang luar negeri dan defisit anggaran Pendanaan IKN yang menggunakan skema APBN perlu perencanaan anggaran yang matang Saraswati & Adi (2022).

Skema pendanaan IKN yang terpusat pada pendanaan diluar APBN dimana anggaran APBN yang digunakan hanya sebesar 91,29 Triliun saja atau sebesar 19,54%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan APBN untuk mendanai secara langsung proyek hanya sebesar 19,54%. Sisa anggaran yang dianggarkan bersumber dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU dan modal badan usaha. Pembangunan IKN sendiri menjadi salah satu *major project* dengan anggaran yang tertinggi bernilai RP 466,98 Triliun Hidayat (n.d.). Akibatnya, kemungkinan beberapa fasilitas seperti infrastruktur dasar, infrastruktur umum, dan beberapa fasilitas lainnya yang memiliki anggaran bersumber dari KPBU dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu ataupun memakan biaya yang lebih mahal dikarenakan selesai tidak tepat waktu.

Menurut Nugroho (2022) penelitian ini membahas bagaimana bentuk IKN, untuk mengetahui bentuk IKN, serta pendanaan untuk pembangunan IKN Nusantara. Syafrudin & Maiwan (2022) memahami masalah penelitian dengan kritik terhadap pendanaan pemindahan ibukota. Prianggodo (2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan IKN memiliki sejumlah potensi masalah dan pembangunan IKN memiliki skala dan pendanaan besar. Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir hutang Indonesia sebesar 396,3 miliar US dollar. Agar pemerintah meninjau ulang skema pendanaan yang tidak seimbang dengan APBN yang hanya dianggarkan sebesar 91,29 Triliun atau hanya sebesar 19,54%, berdasarkan fakta faktual diatas dikhawatirkan pendanaan pemindahan IKN akan tersendat atau terlambat sehingga menimbulkan biaya yang melonjak.

Pemindahan IKN berdampak buruk bukan hanya pada pendanaan saja, mega proyek yang begitu besar dan anggaran yang cukup besar sebesar RP 466,98 Triliun yang tidak cukup dengan anggaran APBN dan pemerintah menargetkan Pembangunan IKN selesai dalam kurun waktu 5 tahun yang dikhawatirkan Pembangunan IKN gagal sedangkan yang dipertaruhkan untuk pembangunan IKN adalah kekayaan hutan Indonesia yang akan terancam di deforestasi Karena menurut KLHS untuk melakukan rehabilitas hutan 900 hektare pertahun dengan persen keberhasilan yang rendah, selain itu butuh waktu 99 tahun untuk mentransformasikan hutan IKN menjadi hutan kembali. Penelitian ini berkontribusi untuk pemerintahan di era masa jabatan Presiden Jokowi beserta jajarannya dapat memperkecil resiko kerugian dari kegagalan

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pemilihan metode penelitian ini, karena penelitian kualitatif cocok dengan kajian penelitian kami yang membutuhkan analisis data yaitu kualitatif yang cenderung bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis data. Penelitian ini kami mengambil data primer seperti data pemerintahan yang kami kaji dan data sekunder yang kami ambil dari hasil penelitan dari jurnal-jurnal, Sehingga kami bisa menghasilkan data yang lebih komprehensif. Dampak buruk terhadap IKN sebagai proyek besar dengan anggaran yang timpang dan banyak hal yang dipertaruhkan terhadap Pembangunan IKN membuat kami tertarik dan menjadikan pendanaan pemindahan IKN yang mengalami ketimpangan sebagai objek penelitian. Alasan mengambil pendanaan pemindahan IKN sebagai objek penelitian karena pendanaan adalah faktor

utama untuk kelangsungan dan kelancaran pemindahan IKN yang mempertaruhkan kekayaan hutan Kalimantan.

Penelitian ini dilakukan secara analisis data primer yang berasal dari data pemerintahan, dan data sekunder yang berasal dari jurnal-jurnal dan observasi yang diambil melalui media sosial. Penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan terhadap Pemindahan IKN, yakni:

1. Apa urgensi pemerintah memindahkan Ibu kota negara?
2. Bagaimana proses pembagunan Ibu Kota Negara?
3. Apa dampak yang akan ditimbulkan akibat pemindahan Ibu Kota Negara

Penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup dokumen nasional, jurnal dan juga web yang membahas pemindahan IKN.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1) Urgensi pemindahan Ibu kota negara

Pemindahan ibu kota negara adalah upaya pemerintah untuk mempersiapkan Indonesia di tahun 2045 menjadi smart government, untuk mencapai tujuannya tentunya Indonesia menjadikan ibu kotanya menjadi panutan kota yang lainnya, dengan beberapa konsep ibu kota ideal yang sesuai yang direncanakan pemerintahan. Seperti hasil wawancara peneliti kepada salah satu sumber, ia mengutip dari jurnal pemerintahan Indonesia adalah ibu kota yang *smart, green and beautiful city* guna dapat bersaing secara internasional maupun regional. Adapun harapan dan cita-cita Presiden Joko Widodo dan juga rakyat Indonesia ingin mempunyai ibu kota yang berkelas dunia tentunya ibu kota yang smart, ramah lingkungan dengan mengkombinasikan dengan kayanya budaya Indonesia (Aparatur & Negara, 2022). Kita dapat membayangkan begitu indah ibu kota yang *smart* namun *green* kemudian ibu kota yang maju namun tidak meninggalkan budayanya sendiri, Nampaknya semua orang Indonesia bahkan dunia mengharapakan ibu kota yang ideal seperti itu.

Ide pemindahan Ibu kota negara pernah direncanakan Presiden Soekarno pada tahun 1957, kemudian pada era orde baru pernah direncanakan pada tahun 1990-an, setelah lama tidak dibahas untuk pemindahan ibu kota negara, ide ini muncul Kembali di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun belum dapat terealisasikan. Keseriusan pada era Presiden Jokowi terhadap pemindahan ibu kota negara menjadikan IKN sebagai salah satu RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024. Dibuktikan keseriusannya, kementerian Bappenas Menyusun akademik rancangan undang-undang (RUU) pemindahan ibu kota negara kemudian disahkan menjadi undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara pada tanggal 18 juni 2022 kemudian pemerintah menyusun strategi yang strategis melalui peraturan presiden (perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN) (Aparatur & Negara, 2022). Berdasarkan wawancara kepada seorang sarjana administrasi publik bahwa ia mengutip Melalui Kementerian Bappenas pemerintah telah menjelaskan beberapa alasan untuk memindahkan Ibu kota negara ke Kalimantan Timur diantaranya sebagai berikut:

- a. Daya tampung Jakarta yang tidak ideal

Salah satu urgensi pemindahan ibu kota Negara adalah upaya pemerintah meringankan daya tampung Jakarta yang sudah tidak ideal lagi baik menampung hal hal yang dianggap penting seperti ekonomi dan politik bahkan sensus penduduk yang padat sudah melebihi kapasitas Jakarta (Turohmah, 2022). Kepadatan penduduk Jakarta sudah melebihi kapasitas maksimum kota Jakarta pada tahun 2013 saja menurut Badan pusat statistik jumlah penduduk negara Indonesia pada saat itu mencapai 250 juta jiwa dan Jakarta menyumbang 3,6 % yaitu 9.607.787 juta berdasarkan data pemerintahan Jakarta luas kota Jakarta 740,3 Km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 14.000 jiwa per-km<sup>2</sup> (UNJ, n.d.). Berdasarkan keterangan diatas kota Jakarta mengalami ketimpangan jumlah penduduk yang tinggi yang tak sesuai dengan luas daerahnya.

- b. Kemacetan

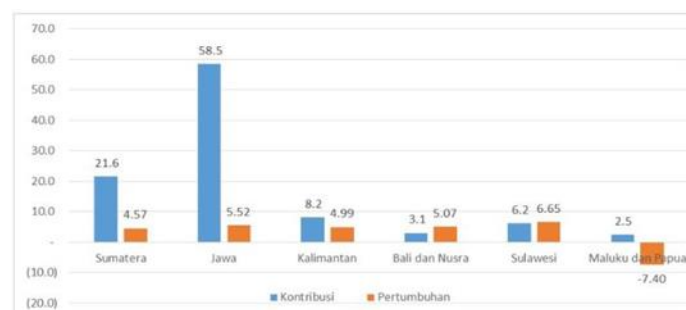
Dengan masalah yang sudah akut bagi Jakarta yaitu banjir dan juga kemacetan seperti halnya pemindahan ibu kota menjadi upaya pemerintah memperbaiki ibu kota menjadi lebih baik terutama dalam geografisnya, kementerian Bappenas menyatakan salah satu urgensi pemindahan ibu kota keluar pulau Jawa adalah karena masalah macet dan banjir yang sulit atau sudah menjadi akut sehingga kota Jakarta menjadi kota terburuk ke 4 saat sibuk lalu lintas dari 390 kota yang di survei. Kemudian kota Jakarta teurut pada urutan ke 9 kota terburuk untuk kepuasan pengemudi. Kemacetan kota Jakarta yang sulit diatasi karena kepadatan penduduk mengakibatkan kerugian (Prabowo, 2009).

c. Banjir

Jumlah penduduk yang berimbang menurut WHO batas maksimal 9.600 jiwa tiap km<sup>2</sup> sedangkan Jakarta melebihinya hal ini yang akan berdampak negatif kepada kota Jakarta salah satunya banjir, kebaran dan juga tentunya macet yang mengganggu aktifitas lalu lintas kota (Razii Abraham, Dicky Iqbal Lubis, Muhamad Indrawan, 2023).

Berdasarkan beberapa data yang kami paparkan diatas dari beberapa urgensi pemindahan Ibu kota negara (IKN) dapat kita lihat begitu urgen pemindahan ibu kota negara salah satunya yang paling terpenting daya tampung kota Jakarta yang sudah tidak ideal tentunya selain situasi yang urgen pemindahan ibu kota pemerintah Indonesia memiliki tujuan untuk memindahkan ibu kota, kami mewawancarai beberapa tujuan pemindahan Ibu kota negara yang paling terpenting adalah pemerataan ekonomi di Indonesia bagian timur dengan harapan dapat merubah perekonomian Indonesia yang terkesan jawasentris menjadi merata (Hasibuan & Aisa, 2020). Pemerintah memindahkan Ibu kota baru ke kalimantan timur adalah upaya mengatasi kesan jawasentris di Indonesia yang dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya:

- Kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di pulau Jawa mencapai 56,10 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia, dapat dilihat dari hasil data BPS tahun 2020 menyatakan populasi penduduk di pulau Jawa mencapai 151,59 juta.
- Pulau Jawa mendominasi kontribusi ekonomi paling tinggi dalam produk domestik bruto (PDB) sebesar 57,89 persen pada tahun 2021 hasil data Badan pusat statistik (BPS) kontribusi pulau Jawa kepada negara Rp16.970,8 triliun dengan pendapatan perkapita dari Produk domestik bruto (PDB) sebesar RP. 62,2 juta atau setara dengan USD4.349,5 yang dimana pendapatan PDB di pulau Jawa didominasi oleh daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) 20,85 persen dari pulau Jawa, sedangkan yang mendominasi pada daerah tersebut adalah Jakarta PDB perkapita di Jakarta mencapai Rp 274,7 juta sementara rata-rata nasional hanya mencapai 62,2 juta



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Terhadap PDB Nasional Per Pulau (2019)

## 2) Proses Pembangunan IKN ditinjau melalui yuridis hingga tahapan pembangunan

Ide pemindahan Ibu kota negara pernah direncanakan Presiden Soekarno pada tahun 1957, kemudian pada era orde baru pernah direncanakan pada tahun 1990-an, setelah lama tidak dibahas untuk pemindahan ibu kota negara, ide ini muncul kembali di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun belum dapat terealisasikan. Keseriusan pada era Presiden Jokowi terhadap pemindahan ibu kota negara menjadikan IKN sebagai salah satu RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2020-2024. Dibuktikan keseriusannya, kementerian Bappenas menyusun rancangan undang-undang (RUU) pemindahan ibu kota negara kemudian disahkan menjadi undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara pada tanggal 18 juni 2022 kemudian pemerintah menyusun strategi yang strategis melalui peraturan presiden (pepres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Rincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN) (Aparatur & Negara, 2022).

Tabel 1. kilas balik penyusunan UU IKN

29 september 2021	Presiden Joko Widodo mengirim surat kepada DPR terkait perencanaan pemindahan Ibu kota
7 Desember 2021	DPR RI membuat panitia khusus terkait merancang UU pemindahan IKN
18 Januari 2021	UU IKN versi awal dikeluarkan dan terus di “matangkan”
15 febuari 2022	UU IKN disyahkan

Sumber: Journal Keilmuan Gamapi Kajian IKN

Proses pembangunan IKN sendiri sudah berjalan di mulai sejak 29 september 2022 kementerian PUPR Basuki Hadi muljono telah mendatagina kontrak paket pengerjaan kontruksi.pembangunan IKN sendiri memiliki tahan yang sudah diatur dalam rancangan Pepres perinciaan rencana induk kota Nusantara(Bappenas, 2022)

Tabel 2. tahap pembangunan IKN

Tahap I	2022-2024	Fokus pembangunan insfraktur utama Kompleks istana kepresidenan, perkantoran pemerintah, perumahan ASN dan personal Hankam serta telekomunikasi energi/ kelistrikan dan tranfortasi
Tahap II	2025-2029	Fokus pembangunan di ranah insfrastuktur dan lingkungan (bandara, bendungan, sistem pengelolaan air limbah domestik dll) pengembangan Kawasan IKN, perluasan Kawasan (perkantoran, kawasan industri, universitas, hotel, dll) serta pertahanan (Kemenhan, Polri, BIN, BSSN)
Tahap III	2030-2034	Fokus pembangunan diranah insfrastuktur dan lingkungan (sistem angkutan umum, pengelolaan air), pengembangan kawasan dan perluasan beberapa kawasan (perkantoran, kawasan industri, universitas, hotel dll) serta pertahanan (Kemenhan, Polri, BIN, BSSN, dll)
Tahap IV	2035-2039	Fokus pembangunan diranah insfraktur dan lingkungan seperti kereta api regional, ekspansi sistem pengelolaan air limbah, pembangunan solar farm dll, Pengembangan 4 kawasan yaitu KIPP tahap 2A, IKN barat, IKN timur, dan Kawasan utara, perluasan beberapa Kawasan perkantoran,Kawasan industry, universitas, hotel dll) serta pertahanan (Kemenhan, Polri, BIN, BSSN)

Tahap V	2040-2045	Infrastruktur dan transportasi tahap akhir dan pengembangan potensi bendungan multi guna
---------	-----------	--

Sumber: Artikel web resmi KPBU

Tabel 3. Rincian Fasilitas di IKN Beserta Skema Penganggarannya

Sumber Anggaran	Fasilitas
APBN sebesar 91,29 Triliun	<ol style="list-style-type: none"> <li>Istana negara dan bangunan strategis TNI/POLRI.</li> <li>Pengadaan lahan.</li> <li>Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> <li>Pangkalan militer</li> </ol>
KPBU sebesar 252,46 Triliun	<ol style="list-style-type: none"> <li>Infrastruktur dasar (Air minum dan sanitasi)</li> <li>Rumah dinas ANI/TNI/POLRI</li> <li>Infrastruktur utama (selain yang tercakup dalam APBN)</li> <li>Gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif.</li> <li>Urban transport berbasis rel.</li> <li>Peningkatan konektivitas (bandara, Pelabuhan, dan jalan tol)</li> <li>Sarana Pendidikan, sarana Kesehatan, dan museum.</li> </ol>
Badan Usaha sebesar 123,23 Triliun	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perumahan</li> <li>Pembangunan perguruan tinggi dan swasta.</li> <li>Science-technopark.</li> <li>Sarana Kesehatan swasta.</li> <li>Pusat pembelian.</li> <li>MICE</li> </ol>

Sumber: Diolah dari Bappenas (2020) dalam Fadhil Hasan (Peneliti INDEF)

Adapun tahapan pembangunan IKN saat ini berdasarkan wawancara kami terhadap sarjana Administrasi publik sudah mencapai 38,1 % yang sampai saat ini masih dari awal pembangunan dimana akan selesai pada tahun 2024 (Aidilla, 2023). Adapun perencanaan tahapan I



Gambar 2. Perencanaan Pembangunan Tahap 1

Beberapa pembangunan infrastruktur sudah berjalan beberapa persen seperti tahap 1 IKN yang kontraknya sudah mulai sejak 2021 seperti jalan tol akses IKN tahap I kemudian bangun Istana

Merdeka, kantor Presiden (Dwi Andika Silaban, 2023) lapangan upacara sudah mencapai 22,1% pembangunan kemudian kantor presiden sudah mencapai pembangunannya sekitar 27,525 % , lalu proses pembangunan kantor sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 22,72%, Selanjutnya langkah selanjutnya pembangunan terhadap kantor kementerian kordinator 1 sudah mencapai 12,78% kementerian kordinator 3 sudah mencapai 10,429% kementerian koordinator 4 15.135% kemudian progres bangunan kantor sekretariat negara sudah mencapai 16,165 % , sementara itu rumah tapak jabatan menteri (RTJM) sudah mencapai proses bangunan 22,681% (Brilian,2023). Adapun proses pembangunan tahap 2 mencakup proyek-proyek yang ditandatangani pada April sampai Mei 2023 seperti bangunan kementerian kordinator 2 dan rumah ASN (Dwi Andika Silaban, 2023) sudah mencapai 0,09% yang terdiri dari 39 paket fisik terkontrak dan juga sedang proses lelang (Brilian, 2023).

Berdasarkan keterangan di atas Pembangunan IKN terlihat berjalan dari mulai tahap 1 yang sudah mencapai 38,1% dan juga tahapan 2 yang sudah mencapai 0,09%, namun ternyata didalamnya ada beberapa kendala yang menghambat pembanguan IKN seperti:

- a. Investasi Swasta IKN masih terbatas

Tabel 4. Rincian IKN Sebagai Bagian dari Major Project 2019-2024

No	Nama Proyek Strategis	Manfaat	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
10	Ibu Kota Negara (IKN)	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Indonesia Timur (KIT) untuk pemerataan wilayah.	466,98 • APBN: 91,29 • KPBU: 252,46 • Badan Usaha: 123,23	Kementerian PUPR, Kementerian Bappenas, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Usaha.

Sumber: Lampiran II Perpres No 18 Tahun 2020

Berdasarkan wawancara kami kepada Mahasiswa jurusan Adminitrasi publik bahwa Pendanaan IKN melalui 3 sumber pendanaan yaitu APBN (anggaran pendapatan belanja negara) 90,4 T , sumber kedua sektor swasta 24ocial24u sebesar 123,2 T, kemudian sumber ketiga bersumber KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha 252,5 T (Kementerian luar negeri, 2023). Namun realisasi investasi badan usaha milik swasta masih terbatas, saat ini dana bangunan masih terpangku pada APBN walaupun deputi bidang otoritas IKN Agus wicaksono mengklaim minimnya pembiayaan swasta proyek IKN bukan berarti sepi peminat sudah 160 *letter of intent* (LOI) yand dating dari investor luar negeri (koran tempo, 2023)

Berdasarkan wawancara kami terhadap sahabat kami Sarjana Adminitrasi Publik skema KPBU sendiri memiliki beberapa kendala diantaranya:

1. Proses pelaksanaan pengadaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses pelelangan tender untuk proyek dengan skema KPBU memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan proyek IKN ditargetkan selesai dalam 5 tahun. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap Pembangunan IKN dikarenakan mayoritas dana yang digunakan untuk membangun IKN berasal dari KPBU yaitu sebanyak 252,46 Triliun atau setara 54,06%.
2. Proyek KPBU mayoritas dikuti dan dilaksanakan oleh BUMN.



Proses Pembangunan dengan skema KPBU juga bermasalah dikarenakan mayoritas dikerjakan BUMN yang juga di danai oleh APBN. Hal tersebut tentunya akan menurunkan daya saing pada setiap tahap Pembangunan dikarenakan Badan Usaha yang mengikuti kompetisi pelelangan proyek memiliki sumber modal yang sama yaitu berasal dari pemerintah.

Permasalahan pendanaan yang dikhawatirkan proyek IKN tidak dapat terselesaikan hingga tahap akhir atau dikhawatirkan selesai namun menambah biaya karena terlambatnya proses pembangunan sehingga memperbesar hutang Indonesia.

b. Problema lingkungan dan sosial penetapan IKN



Gambar 3. Periode 2020-2024 Pemindahan Tahap Awal

Pada salah satu rencana tahap ke 1 adalah dipindahkannya para ASN Rentan konflik sosial karena setidaknya ada 4 kecamatan seperti ada 26 desa di kecamatan sepaku kemudian 23 desa di kecamatan samboja selanjutnya 8 desa yang terdapat pada kecamatan muara jawa dan juga 15 desa pada kecamatan lou jumlah penduduk masing-masing kecamatan sebagai berikut.

Tabel 5: Sensus penduduk daerah wilayah rencana IKN

Kecamatan	Desa	Jumlah penduduk
Sepaku	26	31.814 jiwa
Samboja	23	63.128 jiwa
Muarajawa	8	37.857 jiwa
Lou	15	52.736 jiwa

Source: WALHI

Berdasarkan data diatas setidaknya ada 4 kecamatan yang akan terdampak dengan pemindah ASN 7.687 jiwa. Terdapat dokumen yang beredar terhadap tahap pertama IKN salah satunya pemindahan ASN paling tidak setiap ASN yang pindah terdapat 4 orang (Walhi, 2022) yang

mengikuti pindah (suami/istri dan 2 anak/ perkerja rumah tangga). Hal tersebut dikarenakan perbedaan kepribadian diantara ASN yang hidup di wilayah metropolitan dan warga sekitar yang mayoritas penduduk wilayah pedesaan atau (*rural area*) akan berdampak konflik horizontal dan konflik vertikal antara dua komunitas. Warga sekitar yang mayoritas Suku Dayak yang masih berpegang teguh kepada adat istiadat suku Dayak beserta seluruh nilai tradisonalnya berpotensi menentang kedatangan masyarakat urban ASN. Konflik vertikalpun berpotensi terjadi antara pemerintah dengan masyarakat tradisional yang disebabkan oleh pengalih fungsian lahan, eksploitasi hutan adat, dan menghasilkan masyarakat heterogen yang tidak akur.

Berdasarkan wawancara kami kepada sahabat kami seorang Sarjana Administrasi Publik beberapa kendala dikawatirkan kendala tersebut yang paling urgen adalah kendala dana menghalangi pembangunan IKN atau pembangunan IKN tidak dapat terselesaikan dan membuat kerugian dari beberapa hal yang dipertaruhkan untuk pembangunan IKN.

### 3) Dampak Akibat pemindahan IKN

Kendala yang sangat mengancam adalah pendanaan yang timpang karena sumber pendanaan IKN yang pasti pada pendanaan APBN 90,4 T atau hanya sebesar 19 % yang dikhawatirkan tak dapat menyelesaikan proyek ini, sedangkan banyak yang dipertaruhkan untuk proyek ini seperti:

#### a. Dampak terhadap alam

Pemerintahan mengusung konsep IKN sebagai kota maju, pintar, hijau *forest city* dimana 75% IKN merupakan kawasan hijau, Namun jadi pertanyaan kritis karena karena 256 ribu hektar itu hutan, jika kawasan hijau 75% berarti akan terjadi deforestasi sebesar 30% untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Lebih lanjut laporan BAPPENAS menjelaskan bahwa diketahui kawasan hutan yang akan menjadi IKN dalam kondisi hutan yang tidak baik. Dari 256 ribu hektar ada 43% saja yang berhutan artinya terjadi deforestasi sekitar 57 % kawasan.

Maka penting sekali rasanya meningkatkan *forest recovery*, lalu mampukah mentransformasikan hutan eukaliptus yang berkualitas lebih rendah dari primer hutan tropis yang mampu mensuplai oksigen, biodiversitas, kelstarian hutan dan lainnya.

Dari deforestasi tersebut banyak sekali dampak resiko yang besar untuk Pembangunan IKN karena menurut KLHS untuk melakukan rehabilitas hutan 900 hektar pertahun dengan tingkat keberhasilan yang rendah, selain itu butuh waktu 99 tahun untuk mentransformasikan hutan IKN menjadi hutan kembali. Pembangunan IKN bukan hanya berdampak kepada perihal ekonomi saja, namun dapat berdampak kepada kekayaan hutan Indonesia, dalam kajian KLHS terhadap IKN setidaknya ada 3 faktor dampak dari IKN:

#### i. Ancaman terhadap sistem tata air dan perubahan iklim

Deforestasi akan menyebabkan perubahan siklus hidrologi, Dampak rusaknya siklus hidrologi akan menyebabkan pencemaran air dan kekeringan sehingga bukan hanya berdampak kepada kesehatan bumi, namun akan berdampak juga terhadap ekonomi, Ketika pencemaran air dan kekeringan terjadi akan meningkatnya biaya ekonomi terhadap air.

#### ii. Ancaman terhadap flora dan fauna

Di tinjau dari perubahan siklus hidrologi menyebabkan pencemaran air dan kekeringan yang akan berdampak kepada flora dan fauna di area IKN dampak buruk kepada flora dan fauna yang akan berdampak buruk juga kepada ekosistem hutan tropis, maka akan merusak sistem rantai makanan.

#### iii. Ancaman terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup

Lokasi IKN 256 ribu hektar bukan semuanya area *forest*, namun hanya 43% saja yang berhutan, telah tercatat 162 konsensi tambang dan 2 konsensi hutan, seperti mana yang

kami paparkan dari keterangan (Walhi, 2022) area IKN mengalami 57% deforestasi sebelum perencanaan IKN di rencanakan dan pemerintahan menjadikan IKN sebagai capaian menjadi kota yang berkelanjutan dunia yang didalamnya salah satu *forest city* 75 % minimal, ini yang menjadi pertanyaan kritis, Ketika IKN dalam perencanaan saja area hutannya sudah terdeforestasi 57% oleh area kosensi dan ditambah insfraktur IKN yang berkisar 30% deforestasi dan ini yang akan mengancam terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup.

b. Dampak terhadap politisi daerah setempat

Pembentukan jajaran pemerintah yang akan memerintah IKN berbeda dengan pembentukan jajaran pemerintah DKI Jakarta sebagai Ibu kota Indonesia hari ini. Indonesia menghendaki adanya pembentukan provinsi khusus DKI Jakarta dimana wilayah tersebut memiliki beberapa kedudukan khusus akan tetapi memiliki proses pemerintahan yang sama dengan provinsi lainnya termasuk mengadakan pemilu untuk memilih kepala daerah. Hal tersebut membuat warga DKI Jakarta masih dapat memilih Gubernur dan wakilnya. Sementara itu, IKN Nusantara dipimpin oleh Ketua Otorita yang bertaraf setingkat menteri yang dipilih langsung oleh presiden atas persetujuan DPR, hal tersebut menyebabkan tidak adanya pemilu bagi masyarakat IKN sehingga proses pemilihan kepala daerah tidak dijalankan secara demokratis.

c. Ancaman permasalahan fiskal terhadap hutang

Permasalahan hutang merupakan permasalahan yang menjadi ancaman pada proyek pembangunan fisik terutama proyek pembangunan infrastruktur berskala besar. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya pemerintah menekan porsi anggaran secara besar untuk membiayai proyek tersebut. Hal tersebut menyebabkan teralihkannya porsi anggaran belanja untuk belanja-belanja lainnya seperti belanja program sosial, belanja aset pertahanan, dan belanja-belanja lainnya yang tidak kalah penting dengan proyek infrastruktur. Menurut (Paramita & Panjaitan, 2018) pada tahun 1998-2017 mengalami ketidakseimbangan sustainabilitas fiskal Indonesia, hal ini disebabkan pemerintah yang mengejar salah satu programnya yang tertinggal yaitu pembangunan infrastruktur yang menyebabkan peminjaman hutang yang cukup besar untuk menutupi anggaran pembiayaan pembangunan infrastuktur. Saat ini kecenderungan pemerintah pusat menggunakan pembiayaan jangka pendek lebih besar dari pada pembiayaan jangka pendek yang tentunya akan memperbesar hutang Indonesia karena pemerintah menggunakan pembiayaan jangka pendek untuk pembangunan jangka pendek sehingga berkonsekuensi Indonesia memakai hutang baru untuk menutup hutang yang jatuh tempo

Berdasarkan metode VECM, pengaruh positif terhadap fisik dipengaruhi rasio hutang sebelumnya terhadap PDB, inflasi, suku bunga riil dan pertumbuhan ekonomi yang menyeimbangkan fiskal. Walaupun berdasarkan analisis bahwa ketiga rasio turun yaitu rasio utang terhadap PDB, rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan, rasio keseimbangan primer terhadap PDB. Mengindikasikan tidak meningkatkan posisi keuangan pemerintah karena pemanfaatan utang menjadi tidak produktif karena pemerintah meminjam utang untuk membayar bunga utang bukan untuk belanja kebutuhan produktif. Inilah yang membuat ancaman utang Indonesia karena pemerintah terus mendahulukan target pembangunan infrastruktur daripada keseimbangan sustainabilitas pada tahun 2017 ditambah dalam periode 2019-2024 Indonesia memiliki 40 proyek besar dengan proyek yang menggunakan anggaran besar diantaranya pemindahan IKN, kereta cepat, revitalisasi pulau komodo

#### 4. Kesimpulan

Kota Jakarta yang terdampak ancaman banjir dan tenggelam serta polusi akibat kepadatan penduduk yang menjadikan pemindahan ibu kota menjadi solusi. Saat ini Pembangunan Ibu kota negara baru, telah berjalan proses pembagunan tahap 1 dan tahap 2 terlihat baik-baik saja. Namun pemindahan

Ibu kota Negara baru akan berdampak buruk dan mengancam terhadap alam di area IKN sendiri, terlebih pendanaan pemindahan Ibu kota yang dikhawatirkan tidak terselesaikan karena dana anggaran yang tidak stabil. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan pembangunan IKN tetap perlu dilanjutkan dikarenakan sudah berjalan dengan baik dan urgensi yang penting karena Jakarta sering terjadi bencana banjir, polusi dan jumlah penduduk yang terlampaui padat. Namun penulis juga menyarankan pemerintah perlu mencari investor agar keberlanjutan pembangunan IKN dapat berjalan dengan baik dan berhenti menggunakan APBN.

### Daftar Pustaka

Aidilla, T. (2023). *Progres Pembangunan IKN Nusantara*. REPUBLIKA.

Aparatur, T., & Negara, S. (2022). The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning (JISDeP) is a journal published by Centre for Planners' Development Education, and Training (Pusbindiklatren), Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency Republi. *Simpul Perencana*, 43.

Bappenas, K. (2022). *rancanganperaturanIKN*. Kementerian Bappenas.

Brilian, A. P. (2023). "Begini Progres Pembangunan IKN Sampai Saat Ini." DetikProperti.

Dwi, AndikaSilaban, M. W. (2023). *Begini Progres Pembangunan IKN per Agustus 2023, Sudah Bisa Ditempati 2024?* Tempo.Co.

Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak dan resiko perpindahan ibu kota terhadap ekonomi di indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 183–203.

Kementerian luar negeri. (2023). *Minat Investasi ASEAN di IKN, Dari Properti Hingga Energi Terbarukan*. Kementerian Luar Negeri.

koran tempo. (2023). *7 fakta pembangunan IKN, dari kendala biaya hingga ancaman banjir*. Koran Tempo.

Paramita, R., & Panjaitan, J. Y. (2018). Dampak Utang Pemerintah Pusat Terhadap Keberlanjutan Fiskal Indonesia Periode 1998-2017. *Jurnal Budget*, 03(01), 1–27.

Prabowo, H. (2019). *Soal Ibu Kota Dipindah, Komisi II: Beban Jakarta Sudah Sangat Berat Baca selengkapnya di artikel "Soal Ibu Kota Dipindah, Komisi II: Beban Jakarta Sudah Sangat Berat."* Tirto.Id.

Razii Abraham, Dicky Iqbal Lubis, Muhamad Indrawan, dan R. F. (2013). *VISA MASUK KOTA: ALTERNATIF KEBIJAKAN KAUM URBAN UNTUK MENGATASI KEPADATAN PENDUDUK JAKARTA*.

Turohmah, S. N. ia, Wulandari, D. A., Rozan, F. A., & Imaduddin, A. H. (2022). Membongkar

rencana pemindahan Ibu kota. *Keilmuan-Gamapi\_Kajian-IKN\_17-Mei-2022*.

UNJ, R. (n.d.). “*Apakah terdapat perbedaan tingkat subjective well-being pada masyarakat DKI Jakarta yang ditinjau dari faktor demografi ?*”

Walhi. (2022). *RUU Ibu Kota Negara: Mengulang Inkonstitusionalitas Omnibus Law*.  
<https://www.walhi.or.id/index.php/ruu-ibu-kota-negara-mengulang-inkonstitusionalitas-omnibus-law>.